

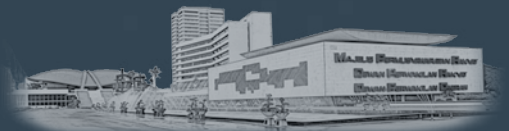


BULETIN

# PARLEMENTARIA

NOMOR: 813/IV/2014

V/APRIL 2014



## DPR Dukung *Judicial Review* UU Perlindungan Anak

# DPR Dukung *Judicial Review* UU Perlindungan Anak



Wakil Ketua Komisi X DPR Utut Adiyanto saat diwawancara wartawan.

Seiring perkembangan kasus kriminal yang menjadikan para anak sasaran tindak kekerasan dan pelecehan seksual, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) akan mengajukan *judicial review* atas UU Perlindungan Anak. Langkah ini didukung Komisi X DPR RI.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI dengan KPAI, Rabu (23/4), banyak isu krusial yang perlu dicermati kembali dari UU Perlindungan Anak. Di antaranya soal membangun lingkungan sekolah yang ramah bagi anak. Sekolah dinilai tidak cukup memberi perlindungan bagi para anak didik. Kekerasan yang dilakukan guru terhadap anak sudah sering kali terjadi.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X Utut Adiyanto (F-PDI Perjuangan) dan didampingi Ketua Komisi X Agus Hermanto (F-PD), dihadiri langsung Ketua KPAI Asrorun Niam. Banyak isu aktual yang disorot dalam rapat tersebut, seperti kasus pelecehan seksual di Jakarta International School (JIS) dan pelaksanaan Ujian Nasional (UN).

Komisi X sependapat dengan KPAI bahwa kasus di JIS perlu segera diselesaikan secara hukum. Sementara untuk pelaksanaan UN, hendaknya penjagaan polisi di sekolah-sekolah tidak berlebihan. Polisi juga harus ramah ketika berada di sekolah. Ketidakramahan polisi dan senjata yang secara terbuka dipertontonkan di sekolah, tentu akan sangat mengganggu peserta UN

di sekolah.

“Hanya di Indonesia sekolah yang di jaga polisi dengan senjata terhunus,” kata Utut, saat memimpin rapat. Untuk itu, perlu ada perubahan paradigma dalam memandang anak didik saat berada di sekolah. Secara psikologis, anak-anak lebih jujur daripada orangtua. Di sinilah pentingnya membangun sekolah yang ramah bagi anak-anak.

Untuk menanggapi kasus-kasus aktual di beberapa sekolah dan pelaksanaan UN, Komisi X akan segera memanggil Mendikbud untuk menggali lebih dalam apa sesungguhnya yang terjadi di dunia pendidikan nasional akhir-akhir ini. (mh) foto : naefurodji/parle/hr.



# Dewan Minta Satgas *Outsourcing* Diberi Kewenangan

Komisi IX DPR mendesak Menakertrans dan Menteri BUMN memberi kewenangan kepada Satuan Tugas *Outsourcing* BUMN (Satgas *Outsourcing*) untuk dapat mengeksekusi kesimpulan rapat kerja 4 Maret 2014.

“Komisi IX desak Menakertrans dan Menteri BUMN beri kewenangan Satgas OS BUMN untuk dapat mengeksekusi kesimpulan rapat 4 Maret 2014, sesuai target waktu verifikasi 12 Maret 2014 sampai dengan 12 April 2014 dan selanjutnya 12 April sampai dengan 12 Mei 2014 seluruh permasalahan telah diselesaikan,” papar Ketua Komisi IX, Ribka Tjiptaning saat Rapat Dengar Pendapat dengan Satgas *Outsourcing* BUMN dan Gerakan Bersama Pekerja BUMN (GEBER BUMN) di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (23/4).

Berkenaan dengan hal tersebut, tegas Ning sapaan akrab Ribka Tjiptaning, Komisi IX DPR mendesak Satgas *Outsourcing* BUMN untuk menyelesaikan permasalahan penyerahan sebagian pekerjaan dan perjanjian pemborongan pekerjaan (*Outsourcing*) sebagaimana kesimpulan rapat kerja Komisi IX dengan Menakertrans dan Menteri BUMN 4 Maret 2014 secara nyata sesuai waktunya.

“Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Komisi IX minta Satgas OS untuk melibatkan GEBER BUMN dan/atau serikat pekerja di perusahaan masing-masing dalam setiap proses penyelesaian masalah *outsourcing*,” kata politisi Fraksi PDI Perjuangan ini.

Sebagaimana diketahui, salah satu kesimpulan rapat kerja 4 Maret 2014, Komisi IX bersama Menakertrans dan Menteri BUMN bersepakat untuk :

a. Mengangkat semua pekerja penyerahan sebagian pekerjaan dan pemborongan pekerjaan (*outsourcing*) yang ada di perusahaan BUMN yang tidak sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 66 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan



Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning.

erjaan diangkat menjadi pekerja tetap oleh perusahaan BUMN tersebut.

b. Mempekerjakan kembali semua pekerja *outsourcing* yang sudah di PHK dan sedang dalam proses PHK pada posisi semula dan jabatan semestinya sesuai dengan asal profesionalitas di perusahaan BUMN.

c. Memenuhi semua hak-hak normatif para pekerja di perusahaan BUMN.

d. Membayar secara penuh hak-hak lainnya kepada pekerja BUMN yang menjadi korban PHK tidak sah dengan mengacu pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Selain itu, menurut Ning, Komisi IX akan melakukan rapat konsultasi dengan BPK untuk membahas audit kinerja khusus dalam konteks ketenagakerjaan di lingkungan BUMN.

(sc) foto: naefurodji/parle/hr.

## Patut Dikaji Hukuman Kerja Sosial Bagi Napi Manula

Anggota Komisi III DPR RI Taslim Chaniago mengatakan perlu memberikan ruang bagi penerapan hukuman kerja sosial bagi terpidana yang telah lanjut usia. Dalam kondisi tertentu menurutnya hukuman kerja sosial bisa saja lebih efektif memberikan dampak jera dari pada dipenjara.

“Bagi terpidana koruptor yang lanjut usia, setelah seluruh harta hasil korup-



Anggota Komisi III DPR Taslim Chaniago.

si disita bisa saja hukuman yang diberikan kerja sosial melayani panti jompo, panti asuhan. Disuruh menyapu, ngepel disana pasti sudah jadi beban bagi dia,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Rabu (23/4/14).

Selama ini menurutnya KUHP belum mengatur kerja sosial sebagai pilihan hukuman yang dapat diputuskan oleh majelis hakim di persidangan. Dalam

revisi RUU KUHP yang saat ini sedang dibahas Komisi III kemungkinan itu sedang dibicarakan.

“Kriterianya harus jelas, batasan usia manula itu berapa, jenis hukuman sosialnya bagaimana. Saya mendukung ini dibahas dalam revisi KUHP atas dasar hukuman yang berperikemanusiaan, toh dia sudah sepuh dan diperkirakan tidak akan melakukan lagi perbuatan

yang sama,” imbuhnya.

Penerapan hukuman kerja sosial bagi manula menjadi perhatian ketika KPK menetapkan status tersangka kepada mantan Ketua BPK Hadi Purnomo. Ia dijerat dugaan kasus penyimpangan pajak saat menjabat sebagai Dirjen Pajak. Status tersangkanya juga diumumkan pada saat ulang tahunnya yang ke-67.

Italia merupakan salah satu negara yang menyepakati hukuman kerja sosial bagi para manula. Batasan usia yang ditetapkan adalah 70 tahun. Mantan Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi (77 tahun) termasuk yang divonis kerja sosial atas kasus penggelapan pajak. (iky) foto: riska/parle/hr.

## KPK Berhasil Buat Koruptor Tidak Tenang



Anggota Komisi III DPR Nudirman Munir.

Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo sebagai tersangka akan menjadi *shock therapy* bagi siapapun yang pernah terlibat korupsi. Pasalnya keputusan menjadi tersangka disampaikan pada saat yang bersangkutan telah pensiun dan berharap memasuki usia tua dengan tenang.

“Kita harus akui langkah KPK ini positif. Penetapan tersangka pada pejabat yang telah pensiun pesannya sangat kuat, *shock therapy*. Jangan merasa aman pada korupsi yang pernah dilakukan sekian tahun lalu, jadi tangan mencencang bahu memikul,” kata anggota Komisi III DPR RI Nudirman Munir saat dihubungi di Jakarta, Kamis (25/4/14).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menyebut masalah perpajakan di negeri ini sangat serius sehingga berhasil menggerogoti potensi penerimaan pajak yang diperkirakan mencapai Rp.3000 triliun. Itulah sebabnya Komisi Hukum pernah membentuk Panitia Kerja Mafia Perpajakan untuk mendorong aparat mengungkap aksi kejahatan perpajakan ini.

“Ketika kasus Gayus terungkap, kita tahu dia bekerja bersama tim yang cukup besar. Kenapa hanya Gayus yang dihukum, mana atasannya? Jadi kalau mantan Dirjen Pajak menjadi tersangka, nah ini termasuk kakap banget,” tandasnya.

Mantan Dirjen Pajak 2002-2004 Hadi Poernomo yang baru saja mengakhiri masa tugasnya sebagai Ketua BPK sekaligus mengumumkan masa pensiunnya terpaksa menelan pil pahit. Komisi anti rasuah menyangkakan penyalahgunaan kewenangan menyangkut permohonan keberatan BCA selaku wajib pajak pada tahun 1999 senilai Rp.5,7 triliun. Potensi kerugian negara pada kasus ini mencapai Rp.375 miliar.

Hadi yang baru saja berulang tahun ke-67 tahun terpaksa harus melupakan sejumlah rencana liburan bersama keluarga, anak dan cucunya. Ia harus menjawab sejumlah sangkaan penyidik KPK dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. (iky) foto: naefurodji/parle/hr.



# Pelecehan Seksual di Sekolah Tidak Boleh Terjadi Lagi

Pelecehan seksual yang menimpa salah satu murid TK Jakarta Internasional School sempat menyita perhatian publik. Sangat disayangkan, seharusnya sekolah menjadi tempat yang aman bagi anak untuk menuntut ilmu, ini malah diperlakukan dengan tidak sepatutnya.

“Pelecehan seksual ini tidak boleh terjadi lagi. Apalagi TK JIS belum memiliki perizinan, sehingga perlu dihentikan sementara. Dengan adanya kejadian ini, seperti membuka tabir bagaimana sebenarnya JIS ini. Jadi, sekarang kita bisa masuk (menyelidiki, RED) seluruhnya, hingga hal-hal yang jelek di dalamnya pun kelihatan,” jelas Ketua Komisi X DPR RI Agus Hermanto, saat ditemui di gedung DPR, Rabu (23/04).

Politisi Demokrat ini berharap, dengan adanya kasus JIS, dapat memberikan masukan terkait sekolah internasional yang ada di Indonesia. Ia berharap, tidak ada sekolah internasional lain lagi yang bermasalah.

“Ini kita anggap sebagai suatu input. Karena dengan adanya kasus JIS, kita berharap jangan sampai terjadi di sekolah lain. Cukup JIS ini saja yang membuat permasalahan, walaupun di sini banyak sekolah internasional yang lain,” harap Agus.



Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto.

Politisi asal Dapil Jawa Tengah ini menilai, sekolah internasional yang beroperasi di Indonesia harus mendapat izin dari Kemendikbud. Selain itu, Kemendikbud juga harus memastikan kurikulum yang diterapkan di sekolah tersebut.

“Ada perizinan khusus untuk sekolah internasional, ada bermacam-macam. Kalau PAUD, harus mendapat izin dari Direktur Jenderal PAUDNI. Soal kurikulum yang diterapkan di sekolah internasional itu, kita belum

tahu apakah menggunakan kurikulum nasional atau tidak. Dalam hal ini, baik JIS maupun sekolah internasional manapun yang ada di Indonesia, harus mengikuti aturan maupun pola yang ada di Indonesia,” tandas Agus.

Terkait dengan pelecehan, Agus menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwajib. Soal administrasi perizinan sekolah juga harus diusut tuntas.

“Masalah pidananya itu biar pengadilan yang memprosesnya. Sedangkan, masalah intern atau pendidikannya, ini merupakan tugas dan fungsi dari Kemendikbud. Masalah pelanggaran-pelanggaran pendidikan administratif yang dilakukan oleh JIS, ini harus tetap ditindaklanjuti,” tegas Agus.

Agus berharap, dengan adanya kejadian ini, sekolah internasional yang beroperasi di Indonesia dapat mengikuti aturan, hukum, atau apapun yang ada di wilayah NKRI.

“Permasalahan ini masih dalam penyelidikan secara lebih mendalam. Kita percayakan hal ini kepada aparat berwajib yang menanganinya. Setelah masa reses ini selesai, kita akan membahas khusus soal JIS ini dengan Kemendikbud,” janji Agus. (sf) foto: [naefurodji/parle/hr](#).



Suasana UN tingkat SMA.

## UN 2014 Cukup Baik

Ujian Nasional tahun 2014 tingkat menengah atas telah selesai. Secara keseluruhan, Anggota Komisi X DPR RI Reni Marlinawati menilai UN tahun ini cukup sukses, walaupun terdapat beberapa catatan penting yang menyertainya.

“Secara keseluruhan, UN tahun ini berjalan cukup sukses dan baik. Distribusi soal juga berjalan dengan baik. Saya kira ini ada peningkatan. Cuma, ada beberapa catatan. Dan berbagai kekurangan yang ada harus dievaluasi dan diperbaiki,” ujar Reni ketika dihubungi Parle via telepon,

baru-baru ini.

Ia menilai, ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaan UN. Misalnya ada beberapa sekolah yang lembar soal dan jawaban tertukar, termasuk soal yang tidak lengkap. Bahkan, anggaran pengawasan yang belum dibayarkan setelah UN selesai. Sehingga mengakibatkan guru-guru sampai ada yang menalangi.

“Ini yang harus menjadi catatan. Kemudian, dari sisi *content* soal. Harusnya jangan sensitif dengan nuansa SARA ataupun politik. Dengan adanya kata-kata berbau politik itu di dalam soal UN kemarin ini menunjukkan ketidakpekaan para pembuat soal,” ujar politisi PPP ini.

Sebagaimana diketahui, dalam salah

satu soal Bahasa Indonesia UN kemarin, terdapat soal yang mencantumkan nama salah satu calon presiden. Banyak pihak menganggap ini sebagai kampanye terselubung.

“Saya mendesak kepada Kemendikbud untuk menginvestigasi dan menemukannya siapa yang membuat soal itu. Karena kalau tidak diselesaikan dengan baik, ini dapat menjadi *preseden* buruk di kemudian hari. Dunia pendidikan terkontaminasi dengan kepentingan politik yang tidak sehat,” sesal Reni.

Di tempat yang berbeda, Ketua Komisi X DPR RI Agus Hermanto menilai Kemendikbud harus segera menindaklanjuti soal UN yang berbau politis ini.

“Kenapa sampai ada soal yang berbau politis. Ini merupakan masukan

untuk Kemendikbud, bahwa tim pembuat soal harus benar-benar dijaga. Ini menandakan bahwa di dalam tim pembuat soal tidak ada yang sempurna,” sesal Agus.

Politisi Demokrat ini meminta Kemendikbud untuk mengkaji lebih dalam dan harus diusut secara tuntas.

“Ini harus dikaji lebih dalam, sehingga Kemendikbud tahu betul latar belakang kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Ini harus diusut secara tuntas. Berbagai permasalahan UN dan JIS nanti akan kami sampaikan, di dalam rapat kerja dengan Kemendikbud. Agar kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini,” janji Politisi asal Dapil Jawa Tengah ini. (sf) foto: *eka hindra/parle/hr.*

## Kasus Pelecehan di Sekolah Bak Pukulan Telak



Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati.

Kasus pelecehan seksual yang menimpa salah satu murid Taman Kanak-kanak Jakarta International School (JIS) baru-baru ini cukup mendapat sorotan dari berbagai pihak. Banyak yang menyangkan kejadian yang sepatutnya menimpa anak usia dini ini.

Anggota Komisi X Reni Marlinawati ketika dihubungi Parle baru-baru ini mengungkapkan, kasus ini bak pukulan

telak terhadap pendidikan Indonesia. Kementerian Pendidikan harus melakukan investigasi mendalam terhadap kejadian ini.

“Pelecehan seksual yang menimpa murid TK JIS ini merupakan peristiwa yang menakutkan. Ini peristiwa yang sangat horor di pendidikan Indonesia. Kasus ini harus membuka mata pemerintah, terutama Kemendikbud dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, bahwa lembaga pendidikan yang bersifat atau berstatus internasional, harus memperoleh perhatian yang lebih. Ini pukulan yang telak buat dunia pendidikan,” tegas Reni.

Politisi PPP ini sangat menyangkan kejadian ini. Ia menilai, sekolah yang seharusnya menjadi rumah kedua bagi anak-anak, dimana anak seharusnya mendapatkan keamanan dan kenyamanan, malah mendapatkan pelecehan.

“Jujur, kejadian ini membuat saya terperanjat. Kejadian ini harus membangunkan kita semua, bahwa kejahatan itu bisa terjadi dimana saja. Kasus-kasus seperti ini perlu mendapat perhatian yang serius dari kita semua. Karena tidak menutup kemungkinan, hal ini bisa terjadi di sekolah atau lembaga pendidikan lain,” tandas Politisi asal Dapil Jawa Barat IV ini.

Dalam hal ini, tambah Reni, sekolah gagal dalam memberikan perlindungan kepada muridnya. Sekolah terkesan bersembunyi dibalik statusnya yang bersifat internasional, namun tidak dapat menjamin keamanan muridnya.

“Jangan bersembunyi di megahnya gedung dan mahal biaya, sehingga seolah meyakinkan bahwa sekolah menjamin keamanan dan kenyamanan muridnya. Kemendikbud dalam hal ini bukan kecolongan lagi, ini kelalaian dan kelengahan Kemendikbud,” tambah Reni.

Selain itu, ia juga menyoroti beberapa hal yang harus menjadi perhatian. Pertama, terkait kurikulum yang diterapkan di sekolah yang terletak di bilangan Jakarta Selatan itu harus jelas. Ia menilai, walapun JIS bersifat sekolah internasional, tetap harus menerapkan kurikulum yang berlaku di Indonesia. Pasalnya, banyak yang berkewarganegaraan Indonesia, maka Kurikulum Nasional harus diberikan, sebagai pengetahuan dasar bagi anak-anak.

“Di sekolah internasional tersebut kan banyak siswa-siswi yang berkewarganegaraan Indonesia, yang notabene, mereka harus mendapatkan pengetahuan tentang Indonesia, misal tentang pahlawan nasional, atau lagu daerah, termasuk harus bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya memperoleh informasi, beberapa sekolah internasional yang ada di Indonesia menggunakan kurikulum asing. Lalu, bagaimana dengan siswa-siswi yang asli Indonesia? Apakah mereka mendapat pengetahuan tentang Indonesia dengan baik? Ini harus mendapat pengawasan,” kata Reni bak bertanya.

Yang kedua terkait perizinan. Ia mencatat, dari 111 sekolah internasional yang berdiri, ternyata yang mendapat izin hanya sekitar 30-an sekolah. Berarti sisanya operasionalnya sudah kadaluwarsa.

“Jangan kemudian, pemerintah merasa karena gedungnya hebat, bahasanya asing, begitu tampak mewah, lalu kemudian kita meyakini bahwa sekolah itu memang bagus. Namun kan akhirnya begini. Sekolah yang terlihat hebat, dengan biaya yang sangat tinggi, namun di dalamnya ada bahaya yang mengancam anak. Pemerintah harus membuka mata. Pemerintah harus arif menyikapi kasus seperti ini,” pesan Reni.

Politisi dari Fraksi PPP ini juga menilai, selama ini sekolah internasional nyaris luput dari jangkauan pemerintah dalam pengawasan. Ia meminta Kemendikbud untuk melakukan pengawasan secara utuh. Pengawasan bukan hanya dari sisi pengelolaannya saja, tapi meliputi sampai ke content pembelajarannya juga.

“Saya pernah menanyakan kepada murid, mereka tidak tahu para pahlawan nasionalnya. Ini sangat menyedihkan,” kata Reni. (sf) foto: *ivan armanias/parle/hr.*

## Terkait *Outsourcing*, Komisi IX Usul Konsultasi Dengan BPK



Suasana rapat Komisi IX dengan Ketua Satgas Monitoring Outsourcing BUMN dan Gerakan Bersama Buruh BUMN.

Anggota Komisi IX DPR RI, Poempida Hidayatullah usul berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tenaga *outsourcing* di BUMN.

Hal tersebut disampaikan Poempida saat Rapat Dengar Pendapat Komisi IX dengan Ketua Satgas Monitoring Outsourcing BUMN dan Gerakan Bersama Buruh BUMN (GEBER BUMN) dipimpin Ketua Komisi IX, Ribka Tjiptaning di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/4) dengan

agenda penjelasan Satgas Monitoring mengenai permasalahan *Outsourcing* di BUMN.

“Kita harus berkonsultasi dengan BPK, dalam konsultasi itu kita harus minta audit kinerja di BUMN-BUMN yang ada catatan-catatannya, dan dari situ baru kita bisa paham bagaimana posisi mereka, kalau tidak memungkinkan, ok kita bisa paham,” papar politisi Partai Golkar itu.

Menurutnya, DPR minta BPK melakukan audit secara obyektif dan hasilnya itulah yang akan komisi dorong. Langkah-langkah inilah yang bisa dikerjakan.

Poempida beralasan, jika tidak berkonsultasi dengan badan tinggi lainnya rasanya DPR dan Pemerintah akan terkunci dalam diskusi yang terus menerus. Tidak ada langkah-langkah konkrit yang terjadi.

“Tujuan kita adalah memberikan kejelasan dari orang-orang yang sudah puluhan tahun bekerja disitu,



Anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatullah.

ini,” imbuhnya.

Ia menyatakan harus ada *mindset* yang berubah dari konteks Satgas. Poempi minta ada keterlibatan daripada OSnya (*Outsourcingnya*). “Kami memang tidak spesifik minta Geber BUMN dalam artian langsung menempel pada BUMNnya, tapi harusnya OSnya kalau mereka tidak terlibat bagaimana mereka bisa tahu perkembangannya,” tambah Poempi.

Dirinya berharap, walaupun pemerintah sudah mau berakhir kalau ada satu sejarah yang bisa dicatat didalam masalah ketenagakerjaan ini. Poempi mengaku beberapa kali dalam rapat dengan Menteri BUMN sudah memancing.

kemudian tiba-tiba hilang dikarenakan mereka demo, sekedar mereka menuntut, dimana keadilan di negara

Artinya Dewan membuka peluang kalau pun sebenarnya ada komitmen untuk rekrutmen menjadi pegawai

tetap secara bertahap dewan juga akan pertimbangkan, namun hal itu tidak diambil pada saat raker dengan Menteri BUMN tersebut.

“Tidak pernah ada kerangka kerja yang jelas, hanya wacana saja yang dilempar ke floor di DPR ini. Hanya agar kita tutup mulut saja. Jadi tidak pernah ada sesuatu yang riil yang dijalankan langkah demi langkah,” jelasnya.

“Apabila dalam waktu tertentu nanti kita tentukan waktunya, tidak kunjung juga ada kinerja yang baik, interplasi itu gampang sebetulnya, interplasi bisa kita dorong kapan saja, hanya persoalan bukan itu. Tapi apakah itu bisa menyelesaikan masalah, apakah ketika SBY sudah datang menyelesaikan masalah, itu pertanyaannya,” tegas Poempi. (sc)/foto: naefurodji/parle/iw.

## Kesaksian Skandal Century Semakin Perkuat Adanya Penyelewengan

Satu per satu kesaksian skandal Bank Century kian terkuak. Kesaksian di persidangan Tipikor Jakarta semakin memperkuat ada penyelewengan keuangan negara oleh para pejabat BI dan Kemenkeu.

“Ini semakin memperkuat alat bukti hukum dari para saksi yang mengungkap skandal Bank Century di bawah sumpah.” Demikian penegasan Anggota Tim Pengawas (Timwas) Century DPR RI, Indra yang dihubungkan lewat saluran telepon, Rabu (23/4).

Dalam kesaksiannya di pengadilan Tipikor, Senin lalu, Direktur Bank Century Hermanus Hasan Muslim, mengungkapkan, Bank Century sebenarnya hanya meminta bantuan repo (gadai) kepada BI. Ternyata BI malah memberi bantuan lebih dengan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP). Bahkan, ketika Bank Century hanya minta bantuan Rp1 triliun, BI justru memberi bantuan hingga Rp6,7 triliun.

Atas fakta persidangan itu, Indra yang politisi PKS, menadaskan, sebetulnya fakta-fakta tersebut sudah lama diketahui. Jadi, sekarang PR besarnya justru ada di KPK. “KPK tak perlu ragu lagi menjerat pejabat BI seperti Boediono dan pejabat lainnya di Kemenkeu.” Skandal Century jelas merupakan perampokan uang negara, kata Indra lagi.

KPK, sambung Indra, tak perlu menunggu pengadilan Tipikor untuk mendapat fakta persidangan. Sebaliknya, harus bekerja cepat karena skandal ini sudah 4 tahun berlalu. “Energi publik sudah terkuras untuk menanggapi berbagai



Anggota Tim Pengawas Century DPR, Indra.

isu di balik skandal keuangan terbesar ini. Progres atas fakta persidangan skandal Century begitu cepat. Untuk itu, Timwas usai reses nanti akan segera rapat kembali untuk memanggil Ketua KPK.

Timwas dipastikan tidak akan masuk angin usai reses. Betapa pun mungkin banyak anggotanya yang kelak tidak terpilih lagi sebagai anggota DPR RI. “Pejabat negara dibiayai oleh APBN dan pajak rakyat. Jadi, harus tetap amanah menjalankan tugas,” tandas Indra. (mh)/foto:iwan armanias/parle./hr.





# Seharusnya DPR Selesaikan Pembahasan RUU Kebudayaan

Anggota Komisi X DPR Oelfah A. Syahrullah Harmanto Ulfa mengatakan, sangat disayangkan jika pembahasan tentang RUU Kebudayaan tidak diselesaikan dengan cepat, karena kebudayaan merupakan salah satu jati diri bangsa yang perlu dijunjung tinggi.

Kendati demikian, dia pesimis RUU ini dapat terselesaikan, karena sekarang sudah menjelang bulan Mei sementara anggota berakhir masa baktinya pada akhir bulan September jadi masih ada waktu 4 bulan, maka seharusnya UU ini dapat diselesaikan meski dengan waktu yang singkat.

RUU Kebudayaan ini merupakan inisiatif DPR, disusun sudah cukup lama pada tahun 2011. "Seharusnya RUU Kebudayaan tersebut sudah selesai dibahas. Untuk menjalankan kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan kebudayaan, undang-undang ini mengamanatkan pembentukan departemen khusus yang membidangi kebudayaan untuk mengawal tujuan disusunnya RUU Kebudayaan," terang Oelfah.

Oelfah mengatakan, melalui Undang-Undang tentang Kebudayaan ini diharapkan terwujud kebudayaan nasional sebagai identitas dan karakter nasional yang dicapai melalui revitalisasi dan reaktualisasi nilai budaya dan pranata sosial kemasyarakatan.

Dalam perbincangannya dengan Parleментарia baru-baru ini, Oelfah



Anggota Komisi X DPR Oelfah A. Syahrullah Harmanto.

mengatakan, dengan perangkat perundang-undangan itu pula maka peningkatan ketahanan budaya nasional akan dicapai. Sekaligus untuk memperkuat jati diri bangsa yang memerlukan filter agar mampu menangkal penetrasi budaya asing yang bernilai negatif dan mampu memfasilitasi teradopsinya budaya asing yang bernilai positif dan produktif.

RUU Kebudayaan juga dimaksudkan untuk meningkatkan apresiasi terhadap kekayaan budaya dan meningkatkan sistem pengelolaan kekayaan budaya. Termasuk sistem pembiayaannya, sehingga aset budaya dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana edukasi, rekreasi, dan pengembangan kebudayaan. (spy,mp), foto : naefurodjie/parle/hr.

## DPR Diminta Lebih Berhati-hati Dalam Proper Test Pejabat Publik

Dalam proses *fit and proper test* atau tes kepatutan dan kelayakan pejabat publik hendaknya DPR lebih berhati-hati. Pasalnya pejabat publik hasil tes kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh DPR ada yang menjadi tersangkut kasus hukum. Karena itu

faktor integritas dan rekam jejak pejabat harus menjadi pertimbangan yang matang.

Demikian harapan yang disampaikan Anggota DPR Hadjrianto Tohari menanggapi ditetapkannya mantan

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo sebagai tersangka kasus keringanan pajak. Saat ditemui di kediamannya di Jakarta, Selasa (22/4) siang, Wakil Ketua MPR ini menyatakan menghargai dan mendukung tindakan KPK tersebut.



Anggota DPR Hadjrianto Tohari.

“Saya menghargai dan mendukung KPK dalam mengungkap dan memberantas kasus-kasus korupsi. Siapa pun yang terkena kasus hukum harus ditindak tanpa pandang bulu,” tegas legislator dari FPG tersebut.

KPK telah menetapkan Hadi Poeromo sebagai tersangka kasus dugaan

korupsi dalam keberatan wajib pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PT Bank BCA tahun pajak 1999-2003. Ketua KPK mengatakan, sehubungan ditingkatkannya sebuah kasus dari tahap penyelidikan dan penyidikan, duduk perkaranya melibatkan mantan Dirjen Pajak dalam hal ini Ketua BPK.

“KPK menemukan fakta-fakta dan bukti-bukti yang akurat itulah KPK mengadakan forum ekspos bersama satgas penyelidikan. Satgas penyidikan dan seluruh pimpinan KPK sepakat menetapkan saudara HP (Hadi Poeromo) selaku Dirjen Pajak 2002-2004 sebagai tersangka,” ungkap Ketua KPK Abraham Samad dalam konferensi pers di Jakarta, Senin lalu.

Salah satu tugas dan fungsi DPR adalah melakukan tes kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) terhadap pejabat publik. Kasus pertama menimpa Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar yang terlibat kasus suap dalam perkara pemilihan Bupati Lebak dan Bupati Gunung Mas, Kalteng sedangkan mantan Dirjen Pajak Hadi Purnomo terpilih sebagai Ketua BPK setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR.

Meski demikian, Hadjrianto mempertanyakan lamanya kasus tersebut diungkap dan ditetapkannya HP sebagai tersangka setelah 10 tahun lebih. Supaya tidak menjadi pertanyaan publik sebaiknya kasus tersebut segera diproses dan diserahkan ke pengadilan Tipikor. “Kami sangat menghormati langkah KPK, juga menghormati bahwa seseorang dianggap bersalah setelah dibuktikan secara hukum di pengadilan dan menjunjung azas praduga tak bersalah,” kata Hadjrianto menambahkan. (mp,od) foto: naefurodij/parle/hr.

## Kapolri Harus Bersihkan Ditlantas dari Suap

Anggota Komisi III DPR RI Harry Wiktaksono menilai Kapolri perlu terbuka terhadap dugaan upaya suap sebesar Rp.350 juta di Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya yang dilakukan seorang pengusaha Biro Jasa. Sejumlah laporan yang diterimanya menunjukkan direktorat ini termasuk rawan penyimpangan dan memang patut dibersihkan.

“Saya prihatin sekali dengan kasus dugaan suap di Ditlantas. Kapolri harus membersihkan karena apa yang terjadi

di Polda Metro Jaya bisa jadi adalah kasus yang terungkap, bagaimana yang tidak?” katanya saat dihubungi di Jakarta, Selasa (22/4/14).

Ia memberikan apresiasi karena penangkapan dilakukan oleh petugas Pengamanan Internal Propam Mabes Polri yang memang sedang melakukan operasi pemantauan bekerja sama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Kebijakan ini perlu diteruskan ke sejumlah Ditlantas lain sehingga ruang untuk penyimpangan semakin sempit.

“Kegiatan pemantauan apalagi bekerja sama dengan KPK perlu ditingkatkan dan diperluas jangan sampai Polri kecolongan terus oleh perilaku oknum ditengah upaya pembersihan institusi,” tambah politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Sejumlah LSM diantaranya IPW (*Indonesia Police Watch*) dan Fitra (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) mendesak Pimpinan Polri untuk menuntaskan kasus suap ini. Ketua Presidium IPW, Neta S Pane meminta



Polri lebih transparan dan melaporkan perkembangan kasus ini ke publik.

“Ada kesan menutup-nutupi kasus ini,” tuturnya. Informasi yang dihipunkan IPW mengungkapkan kasus ini merupakan operasi tangkap tangan yang dilakukan atas perintah Kapolri dalam rangka pembersihan Ditlantas dari suap, pungli dan percaloan. (iky)/foto: andry/parle/hr

Anggota Komisi III DPR Harry Witjaksono.

# Mengagetkan Ketua BPK Jadi Tersangka

Penetapan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo sebagai tersangka oleh KPK mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, Hadi dikenal sebagai sosok yang tegas dan profesional dalam bekerja.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis yang dihubungi lewat telepon, Selasa (22/4), mengaku kaget dengan penetapan tersangka bagi Hadi Purnomo itu. “Mengagetkan juga ya. Selama ini, beliau terkenal profesional dengan komunikasi yang bagus. Orangnyanya juga relatif tegas. Itu yang saya pahami dari sosok beliau,” ungkap politisi Golkar ini.

Hadi Poernomo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pajak saat dirinya masih menjabat Dirjen Pajak di Kementerian Keuangan. Sangkaan yang ditujukan bagi Hadi adalah soal surat permohonan keberatan pajak Bank Central Asia 2004. Dan dugaan kerugian negara mencapai Rp 375 miliar. Sedang nilai transaksi yang bermasalah adalah Rp 5,7 triliun.

Sebagai mitra kerja Komisi XI, Harry sempat bertemu kali pertama di tahun 2004 ketika Hadi masih menjabat Dirjen Pajak. Persoalan pajak, memang,



Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis.

selama ini rahasia. Tapi bila sudah menyangkut pajak terutang negara, mestinya tidak rahasia lagi. Menurut Harry, Direktorat Pajak terkesan untouched.

Perlu pengawasan yang lebih ketat terhadap Dirjen Pajak. Sementara DPR hanya memberi pengawasan politis saja. (mh)/foto:iwan armanias/parle/hr.



Pemungutan suara pemilihan  
Pimpinan Koperasi Setjen DPR RI  
di Gedung Nusantara, Kamis (17/4)  
Foto: Iwan Armanias/Parle.





Kunjungan mahasiswa dan civitas akademika Universitas Dwilendra, Denpasar, Bali ke DPR RI yang diterima oleh Humas DPR RI di *Operation Room* DPR RI, Senin (21/4). Foto: Andri/Parle/HR.



# Komisi III Dukung KPK Tetapkan HP Sebagai Tersangka



Ketua Komisi III DPR Pieter C. Zulkifli.

Ketua Komisi III DPR RI Pieter C. Zulkifli menyampaikan dukungan atas langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo sebagai tersangka dugaan korupsi surat keberatan pajak BCA. Sebagai organisasi profesional menurutnya KPK seharusnya telah didukung data dan bukti yang cukup

sebelum membuat keputusan.

“Bagi saya informasi ini mengejutkan ya. Kita tentu berharap apa yang sudah diputuskan KPK berdasarkan data-data yang valid, sehingga hal itu menjadi dasar yang kuat untuk menetapkan HP sebagai tersangka,” kata Pieter saat dihubungi di Jakarta, Selasa (22/4/14).

Ia juga mengingatkan agar Pimpinan KPK mawas diri karena keberhasilan menjerat pelaku termasuk pimpinan lembaga negara, telah memunculkan harapan besar publik KPK benar-benar menjadi institusi yang bersih sehingga mampu optimal dalam menjalankan tugas mulia, memerangi korupsi.

“Masyarakat dan tentu DPR akan terus mendukung KPK selama melaksanakan tugasnya dengan profesional. Kita sangat berharap KPK tetap menjadi lembaga terdepan dan bersih,”

lanjut politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Dalam keterangan persnya kepada wartawan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menegaskan sebelum sampai pada putusan akhir, telah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan bukti dan fakta. KPK juga meminta keterangan 5 ahli dari berbagai disiplin ilmu untuk memastikan Hadi Poernomo telah menyalahgunakan kewenangannya.

Hadi Poernomo yang juga baru saja menyelesaikan tugasnya sebagai ketua BPK diduga melakukan perbuatan melawan hukum, menyalahi prosedur menerima surat permohonan keberatan pajak BCA dengan dugaan kerugian negara Rp 375 miliar. Ia dijerat pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Tipikor junto Pasal 55 Ayat 1 KUHP dan terancam pidana maksimal 20 tahun penjara. (iky)/foto: iwan armanias/parle/hr

## Ciptakan Komunikasi Yang Simpatik

Sekretaris Jenderal DPR RI, Winantuningtyastiti menghimbau kepada peserta Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Pegawai Setjen DPR RI ke XXVIII Tahun 2014 untuk memanfaatkan forum RAT tersebut dan meminta untuk menciptakan komunikasi yang simpatik.

“Manfaatkan forum amanah ini dengan sebaik-baiknya, ciptakan dan lakukan komunikasi yang simpatik, yang tetap menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam satu ikatan kuat Koperasi Pegawai Setjen DPR RI,” kata Win demikian sapaan akrabnya ketika mengakhiri kata sambutan dalam RAT tersebut di Ruang Rapat KK II Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Kamis (17/4).

Kemudian Win membuka secara resmi Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Pegawai Setjen DPR RI ke XXVIII.



Sekretaris Jenderal DPR RI, Winantuningtyastiti.

Salah satu agenda acara RAT Tahun 2014 tersebut adalah pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengurus Koperasi Periode Tahun 2014-2018. Pada kesempatan tersebut, Win menyampaikan

terimakasih dan penghargaan atas kinerja pengurus Periode Tahun 2010-2014 atas prestasi dan kontribusinya dalam mengelola dan mengembangkan koperasi selama ini.

“Tentunya jangan berhenti berkarya, namun tetap dukunglah keberadaan badan usaha koperasi kita dari sisi ruang dan kewenangan yang berbeda,” pesan Win kepada pengurus periode 2006-2010.

Berdasarkan hasil tahapan pemilihan yang telah dilakukan oleh Panitia

Pemilihan, telah terpilih dua pasangan calon yang dipilih langsung melalui pemungutan suara dalam Forum RAT ke XXVIII ini, yaitu Pasangan Calon I, Djazuli dan Haryadi dan Pasangan Calon II, Ade Effendi dan Sulistyono.

Setelah dilakukan pemilihan pengurus koperasi melalui pemungutan

suara, terpilih pasangan M. Djazuli dan Haryadi dengan perolehan suara 136 dan 63 suara untuk pasangan Ade Effendi dan Sulistyono.

Sebelum RAT Koperasi Tahun 2014 ditutup dilakukan pengundian *door prize* dan kupon umroh. (sc/nt)/foto: iwan armanias/parle/hr.

## Mahasiswa Jangan Apriori Dengan DPR

Para mahasiswa yang sedang mempelajari lembaga DPR, agar tidak apriori. Lembaga DPR tetap baik. Kondisi yang dicitrakan negatif oleh media massa nasional, harusnya tidak mengurungkan niat para mahasiswa untuk menggali informasi dan pengetahuan tentang kelembagaan negara.

Demikian mengemuka dalam pertemuan mahasiswa dan civitas akademika Universitas Dwilendra, Denpasar, Bali, di *Operation Room* DPR RI, Senin (21/4). Para mahasiswa yang hadir merupakan peserta praktik yang sedang mempelajari lembaga-lembaga kenegaraan. Mereka dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan PPKn, semester 4.

Dalam pertemuan tersebut para mahasiswa yang berjumlah sekitar 70 orang dan beberapa dosen mendedikasikan seluk beluk pengenalan lembaga DPR, dari mulai sistem kerja pembuatan UU, pengenalan komisi-komisi, dan fungsi DPR. Ade Effendi dari Humas DPR memberikan pengenalan menyeluruh tentang kelembagaan tersebut ke semua mahasiswa. Hadir pula rektor Universitas Dwilendra,



Ade Effendi dari Bagian Humas DPR memberikan penjelasan kepada mahasiswa Universitas Dwilendra, Bali.

I Ketut Wirawan.

Para mahasiswa tampak antusias mempelajari lebih detail lembaga DPR. Untuk mempelajari lembaga negara, para mahasiswa memang harus mendatangi langsung lembaga-lembaga negara tersebut. Dan kali ini

mereka mendatangi DPR. Universitas Dwilendra sendiri sebenarnya sudah mendatangi DPR empat kali. Dari bekal pengetahuan ini, mungkin ada beberapa mahasiswanya yang tertarik menjadi anggota DPR. Sehingga, bila terpilih kelak, mereka tak asing dengan lembaga ini. (mh)/foto: andri/parle/iw.

## Pemilu Gagal Rampingkan DPR

Komisi Pemilihan Umum memang belum mengumumkan secara resmi siapa pemenang Pemilu Legislatif, namun dari sejumlah hasil hitung cepat sudah dapat diperkirakan 10 partai yang berhasil melewati *Parliamentary Threshold* (PT) 3,5 persen. Itu berarti upaya perampingan partai di parlemen gagal dilakukan.

“Coba bayangkan bagaimana sulitnya mengambil keputusan dari 10 partai yang masing-masing punya kepen-

tingan. Ini berbahaya bagi bangsa kedepan, *voting* yang dilakukan akan penuh negosiasi yang bukan berpihak pada kepentingan rakyat. 9 fraksi saja kita sudah merasa kesulitan, apalagi 10,” kata anggota Komisi III DPR RI, Nudirman Munir dalam dialog radio Bersama Wakil Rakyat kerja sama RRI dengan Pemberitaan Setjen DPR di Jakarta, Jumat (11/4/14).

la menyebut fraksinya sudah berupaya untuk mening-





Anggota Komisi III DPR Nudirman Munir.

katkan angka PT sampai mencapai 5 persen tetapi usulan tersebut ditolak terutama oleh sejumlah partai yang ketakutan tidak berhasil meloloskan kadernya ke parlemen. Titik kompromi akhirnya berlabuh pada pilihan 3,5 persen.

Pada kesempatan itu ia juga meminta segenap pihak mencermati *money politic* gaya baru yang dilakukan oleh sejumlah pihak. Di daerah pemilihannya Sumbar II ada kandidat yang mengajak warga masyarakat tour wisata ke Mifan, dengan fasilitas seperti Dufan di Jakarta.

“Program ini digilir dari kampung ke kampung. Semua layanan gratis mulai dari 5 bis yang disediakan, tiket masuk, makan siang dan bingkisan. Namun mereka didoktrin untuk mendukung caleg tertentu. Bagi saya ini *money politic* gaya baru yang harus diatur rambunya,” ujar mantan Ketua Dewan Mahasiswa UI ini.

Ia berkeyakinan masyarakat yang cerdas tidak akan terpengaruh dengan pendekatan seperti ini akan tetapi tentu lain soalnya kalau yang diajak adalah ibu-ibu dari kalangan ekonomi lemah yang mudah dipengaruhi. “Bagi saya politik uang hanya akan melahirkan calon koruptor yang pasti berhitung berapa uang yang telah keluar,” demikian Nudirman. (iky)/foto:iwan armanias/parle.

## Revisi UU Perlindungan Anak Sangat Mendesak

Perlu segera merevisi Undang-undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002, selain mencabut ijin lembaga atau yayasan JIS. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi VIII, Ida Fauziyah usai rapat audiensi dengan KPAI, Jumat (25/4) di Gedung Senayan Jakarta.

“Tadi teman-teman Komisi VIII memberi masukan untuk mencabut ijin lembaga JIS, karena seharusnya sekolah bisa menjadi rumah kedua bagi anak, yang ramah anak. Jika sekolah malah berkontribusi besar terhadap terjadinya pelecehan seksual terhadap anak, maka Kemendikbud harus meninjau ulang, secara cermat pendidikan yang dilakukan di lingkungan JIS, tidak hanya TK yang bagian kecil di lingkungan itu. Bisa saja itu terjadi di SD, SMP dan SMA sana. Selain itu yang harus dilakukan lainnya adalah segera revisi terhadap UU Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002,” jelas Ida Fauziyah.



Ketua Komisi VIII Ida Fauziyah berjabat tangan dengan Komisioner KPAI.

Dilanjutkan Ida, revisi tersebut menyangkut sanksi hukum terhadap pelaku pelecehan terhadap anak, dimana dalam Undang-undang saat ini hukumannya masih sangat rendah, minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Hal tersebut menurut Ida, tidak memberikan efek jera terhadap pelaku. Sementara bagi korban, pelecehan tersebut bukan tidak mungkin

akan diingat seumur hidupnya.

“Hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual saat ini tidak memberikan efek jera, kami akan revisi undang-undang tersebut dengan memasukkan hukuman terberat seumur hidup,” tegas Ida.

Selain itu yang harus direvisi adalah menyangkut kewenangan KPAI untuk dapat memberikan peran yang lebih maksimal lagi terhadap perlindungan anak Indonesia, tidak sekedar melakukan koordinasi. Bahkan bukan tidak mungkin Komisi VIII juga akan meningkatkan anggaran KPAI, agar bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Menurut Ida, karena keterbatasan dana atau anggaran terkadang menjadi hambatan bagi KPAI untuk dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah-daerah terpencil. (Ayu) foto: andri/parle/hr.

## Soal Politik Uang, Masyarakat Cermin Pemimpinnya

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Khati-bul Umam Wiranu menyampaikan keprihatinan atas maraknya politik uang dalam Pemilu Legislatif. Ia meminta

segenap pihak melakukan introspeksi karena kondisi ini tentu akan mempengaruhi wajah demokrasi Indonesia dimasa datang.

“Saya prihatin tapi tidak dapat menyalahkan masyarakat yang menerima *money politic*. Ada konsep Jawa yang menarik dicermati *manunggaling kawu-*

lo gusti. Masyarakat itu cermin dari pemimpinnya sedangkan pemimpin yang ada merupakan kaca benggala dari rakyatnya,” katanya saat bicara dalam dialog radio, Bersama Wakil Rakyat kerja sama RRI dengan Pemberitaan Setjen DPR di Jakarta, Jumat (11/4/14).

Kondisi sekarang menurutnya para pemimpin sangat pragmatis, mengejar proyek seperti mencari setoran sehingga kemudian banyak yang terjebak korupsi. “Ketika ditahan KPK, banyak yang senyam senyum, merasa tidak punya dosa. O begitu ya pemimpin saya, nanti waktu pemilihan kita gituin juga. Jadi jangan nyalahin pragmatisme rakyat siapa yang mau bayar, saya pilih,” tandasnya.

Pada bagian lain ia secara khusus juga menyoroti kurangnya sosialisasi



Wakil Ketua Komisi II DPR Khatibul Umam Wiranu.

surat suara yang tidak menyertakan foto calon anggota legislatif. Wakil rakyat dari daerah pemilihan Jateng VIII ini mengaku mendapat laporan, terutama dari pemilih manula yang kesulitan mencari caleg pilihan mereka.

“Banyak yang tidak jadi memilih

karena dalam surat suara tidak ada gambar caleg, mereka mengatakan saya cari gambar Pak Umam kok tidak ada, dari pada milih yang lain lebih baik tidak memilih. Nah sosialisasi tentang hal ini ke kampung-kampung tidak ada,” paparnya.

Hal lain yang juga dikritisinya adalah soal pemantauan terhadap kinerja penyelenggara dan pengawas pemilu di daerah. Sejumlah kasus di desa-desa menurutnya mereka cenderung melakukan tindakan yang menguntungkan caleg tertentu.

“Itu problem kita semua di sejumlah desa, baik panwas maupun penyelenggara pemilu itu cenderung memberikan peluang kepada kandidat tertentu,” demikian Khatibul. (iky), foto : riska/parle/hr.

## Cegah Politik Uang, Bawaslu Harus Bertindak Tegas

Maraknya politik uang pada pemilu legislatif 2014 ini harus segera disikapi dengan tegas oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya di daerah. Kepada penyupap maupun masyarakat yang menerima suap, harus ditindak tegas. Demikian ditegaskan anggota DPR Ace Hasan Syazili saat dihubungi baru-baru ini di Jakarta, menanggapi pelaksanaan pemilu legislatif 9 April lalu.

Menurut Ace, praktik politik uang pada pileg kali ini lebih parah dibanding pemilu sebelumnya. Di daerah pemilihannya meliputi Kabupaten Lebak dan Pandeglang, politik uang berlangsung gencar. Banyak warga yang menerima amplop berisi uang antara Rp 40.000 hingga Rp 50.000 pada serangan fajar pileg lalu dari caleg tertentu. Modusnya tim sukses melakukan serangan fajar kerumah-rumah penduduk dan meminta warga memilih caleg tertentu.

Maraknya politik uang juga diakui Ketua DPR Marzuki Alie bahwa Pemilihan Umum tahun ini, terjadi banyak politik uang. “Pemilu ini memprihatinkan, banyaknya praktek-praktek politik uang. Ini berbahaya sebab pada akhirnya yang dirugikan adalah masyarakat,” ungkapnya.

Menurut Ace Hasan yang juga politisi Partai Golkar, praktik politik uang yang marak terjadi karena kurang ketatnya pengawasan oleh Bawaslu. Badan ini dan jajarannya terlalu pasif, tidak berupaya melakukan pencegahan terhadap terjadinya praktik politik uang.

Saat ditanya mengenai kampanye dirinya membagikan kartu baraya dimana warga dibantu pengobatan dan bantuan sosial lainnya, ia menyatakan program yang telah lama



Anggota DPR Ace Hasan Syazili.

dirintis tersebut, bisa kalah dengan serangan fajar yang dilakukan caleg yang dengan segala cara digunakan supaya dapat lolos menjadi anggota DPR.

Salah satu faktor maraknya politik uang karena sitem pemilu proporsional terbuka. Pasalnya caleg berlomba-lomba melakukan berbagai macam cara demi mendapatkan suara terbanyak. Untuk itu dia mengusulkan, sistem pemilu sekarang yang menganut sistem proporsional terbuka hendaknya diubah dikembalikan kepada sistem proporsional tertutup seperti era sebelumnya.

“Sistem proporsional terbuka membuka peluang terjadinya politik uang. Pada pileg kali ini sudah terang-terangan masyarakat meminta imbalan uang sebagai syarat mau memilih caleg yang menghubunginya,” katanya.

Karena itu pula ia mendesak dilakukan evaluasi dan peninjauan ulang terhadap sistem pemilu yang bertentangan

dengan cita-cita mewujudkan pemilu yang berkualitas. Pemilu berkualitas akan terwujud melalui cara-cara yang berkualitas pula baik dari aturan dan penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu. “Kita semua menginginkan peningkatan kualitas pemilu sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi,” kata Ace menambahkan. (mp) foto:naefurodjie/parle/hr.

## Penetapan Tersangka Mantan Ketua BPK Jangan Ada Unsur Politik

Belum lama ini, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) Hadi Poernomo sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan permohonan keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan (PPH) PT Bank Central Asia, Tbk tahun pajak 1999. Hadi dijerat dalam kapasitasnya sebagai Direktur Jenderal Pajak periode 2002-2004.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR Pramono Anung meyakini KPK sudah memiliki bukti dalam penetapan tersangka Hadi. Namun, ia mengingatkan, peristiwa hukum ini jangan ada unsur politik.

“Ini kan kasus yang sudah lama terjadi. Ini kasus ketika Ketua BPK belum menjadi Ketua BPK, tapi masih menjabat Dirjen Pajak. Karena KPK selalu bekerja dengan minimal dua alat bukti, saya meyakini KPK sudah mencari bukti yang cukup untuk menetapkan mantan ketua BPK menjadi tersangka. Yang paling penting adalah jangan sampai kemudian peristiwa hukum itu ada indikasi peristiwa politik,” ujar Pram, panggilan akrab Pramono, di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Kamis (24/04).

Ia khawatir, jika sampai ada unsur politik di KPK pada pengungkapan kejahatan korupsi, dapat mencederai kepercayaan masyarakat. Publik selalu berharap KPK dapat memberantas berbagai kejahatan korupsi.

“Sebab, kalau itu terjadi maka KPK sebagai lembaga yang kita berikan kewenangan yang besar dan harapan publik yang luar biasa untuk memberantas korupsi itu tercederai. Saya termasuk yang mendukung langkah-langkah KPK untuk melakukan perang terhadap korupsi kepada siapapun, termasuk kejahatan korupsi yang dilakukan pada masa lalu,” harap Pram.



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung.

Politisi PDI Perjuangan ini menilai, untuk menghindari kejahatan terhadap pajak, maka instansi perpajakan harus berdiri sendiri, tidak dibawah kontrol Menteri Keuangan.

“Kasus pajak ini kan sudah cukup banyak. Kalau perpajakan itu berdiri sendiri, secara langsung dikontrol oleh Presiden, maka akan lebih baik, karena ini menyangkut penerimaan negara,” kata Pramono. (sf) foto:naefurodjie/parle/hr.

## Parleментарia OK, Tetapi Bisa Lebih OK Lagi

Majalah Parleментарia yang dikelola Bagian Pemberitaan Setjen DPR-RI dalam pandangan Rektor Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Ninok

Leksono, merupakan media internal yang telah masuk kategori OK, tetapi bisa lebih OK lagi bila dikemas lebih baik lagi. Dalam acara Workshop yang

diselenggarakan Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP UI Depok, Kamis (24/4) Ninok menilai, perlunya pengemasan baru karena terjadi

pergeseran yang diminati pembaca.

“Kini yang diperlukan pembaca adalah pemikiran mendalam dan yang disukai adalah pemikiran ringan sehari-hari. Selain itu hal-hal informal yang dikemas dalam Infodutainment (informasi, edukasi dan intertainment),” katanya.

Sementara itu menurut Ninok yang juga Redaktur Senior Kompas ini, Parlementaria dalam tata wajah atau covernya sudah menarik. Namun di sisi lain, artikelnya masih lebih berat kepada naskah (*text heavy*), padahal era sekarang ini adalah infografik. “Saya sarankan dalam pemuatan tulisan, jangan bergaya artikel makalah, justru lebih baik yang bersifat mendongeng (*story telling*),” ia menjelaskan.

Menanggapi tumpah ruahnya informasi dewasa ini sehingga wartawan sering merasa “sayang” untuk memotong artikelnya, ia menyaran, yang harus dimuat, ya harus dimuat. Yang tidak harus adalah opsional, itu pilihan redaksi, nanti bisa konsultasi pada Pemred, dan akan ada pertimbangan yang harus diputuskan dari sisi manfaat dan mudaratnya.

“Tidak semua informasi harus dimuat, pilihannya antara ya dan tidak. Informasi sifatnya opsional. Yang wajib harus ada, yang tidak wajib tidak perlu ada, jangan sampai masalah yang penting tidak dimuat dan dianggap ketinggalan karena dimuat media lain. Ini pinter-pinternya wartawan,” tegasnya.

Sedangkan mengenai perlunya tulisan yang menghibur untuk menarik



Rektor Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Ninok Leksono.

pembaca, Ninok Leksono mengatakan, salah satu fungsi media adalah memberi hiburan. Misalnya, kalau orang susah, dengan membaca salah satu rubrik Parlementaria, beban diringankan. Juga berfungsi intertain artinya bisa senang-senang atau tertawa.

Dalam kaitan ini, saran anggota Dewan Pers ini, redaksi bisa berdiskusi, hiburan seperti apa yang akan diturunkan, misalnya antri pembagian raskin ada cerita mengandung hal lucu tetapi juga ada sisi menarik lainnya. Menghibur juga bisa memberi jalan keluar, misalnya petani atau nelayan yang sedang kesulitan, anggota parlemen bisa membantu menyelesaikan kesulitan konstituennya dengan memberikan cara mudah memperoleh kredit serta mengembangkan UKM.

Menghibur bisa secara langsung, menimbulkan senyum atau ketawa, atau dalam arti meringankan kesusahan. “Pengertiannya menghibur itu luas. Misalkan nelayan yang mengalami kesulitan hidup lalu anggota Dewan bisa mencari jalan keluar. Menghibur itu memberi harapan dan meringankan duka seseorang,” jelasnya.

Kegiatan atau kinerja anggota Dewan termasuk produk legislasi, kata Ninok juga perlu ditulis dalam Parlementaria. Meski demikian perlu diatur dimana substansinya sebanyak 50%, kemudian pengemasan 30% dan tata wajah 20%. “Bagaimana substansi yang 50% ini yang harus diasah. Hanya melalui latihan maka bisa merasakan mana yang akan dipilih semenarik mungkin,” tambah Ninok Leksono. (mp) foto: hr, iw/parle/hr.

## DPR Sharing Soal Pemilu dengan China

Indonesia belum lama ini baru saja menyelesaikan Pemilihan Umum Legislatif. Tak lama, pada Juli mendatang, akan kembali mengadakan Pemilu untuk pemilihan Presiden. Ternyata, pesta demokrasi di Indonesia ini menarik perhatian China.

Bertempat di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III lantai III, Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menerima Duta Besar Ad Interm Republik Rakyat China Liu Hongyang, Kamis

(24/04). Pembahasan utama dalam pertemuan ini adalah terkait pemilu.

“Indonesia sudah melalui Pemilu Legislatif dan akan menyambut Pemilu Presiden yang sebentar lagi akan berlangsung. Sebagai negara yang besar, China ingin mengetahui bagaimana proses Pemilu yang berlangsung di Indonesia,” jelas Pram, panggilan akrab Pramono, usai pertemuan.



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menerima Dubes Ad Interim Republik Rakyat China Liu Hongyang.

Dalam pertemuan itu, Pram menjelaskan Pemilu di Indonesia dapat berjalan dengan baik karena Indonesia telah mengalami pengalaman yang cukup dan juga sudah berulang kali melaksanakan Pemilu.

“Hal ini yang menjadi kekuatan Indonesia, sebagai negara demokrasi. Jika pun ada persaingan dan ketegangan, tidak pernah sampai ada kekerasan, ataupun peristiwa negatif dan sebagainya,” jelas Pram.

Terkait dengan hubungan bilateral antara Indonesia dengan China, Pram berharap kerjasama yang sudah baik selama ini dapat ditingkatkan. Bahkan, Indonesia juga memberikan kesempatan kepada Presiden China Xi Jinping untuk berpidato di Parlemen Indonesia, belum lama ini.

“Hubungan Indonesia dengan China baik. Kita memberikan ruang yang cukup baik kepada China. Bahkan kita memberikan kesempatan kepada Presiden China untuk

berpidato di Parlemen, dan Presiden China merupakan presiden yang pertama kali diberikan kesempatan untuk berpidato di Parlemen kita. Ini merupakan tradisi yang baik kepada negara yang memiliki hubungan yang baik dengan kita,” jelas Pram.

Selain itu, Politisi PDI Perjuangan ini melihat, hubungan dagang antar kedua negara dari waktu ke waktu, dengan pertumbuhan ekonomi kedua negara yang sekarang, sama-sama tumbuh positif secara signifikan.

“Kerjasama ke depan tentu harapannya memberikan keseimbangan kepada neraca keuangan kita. Saat ini, neraca keuangan kita masih negatif dibandingkan dengan China. China juga membuka pasar yang lebar untuk produk-produk Indonesia untuk dipasarkan di sana, seperti tekstil, produk manufaktur, dan lainnya,” imbuh Pram. (sf) foto: naefurodij/parle/hr.

## Sekjen DPR RI Terima Aspirasi DPRD Sumbar

Permasalahan infrastruktur dan lingkungan hidup menjadi pembahasan utama dalam pertemuan Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti dengan 10 Anggota DPRD Sumatera Barat, dan beberapa instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

“Pertemuan dengan Anggota DPRD Sumatera Barat, juga diikuti

oleh beberapa instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Tujuan mereka berkunjung ke Sekjen DPR adalah menyampaikan aspirasi untuk memajukan pembangunan di daerah, terutama 8 daerah terpencil di Sumbar, meliputi 6 daerah di wilayah selatan, yang 2 daerah di wilayah utara,” jelas Winantuningtyastiti di ruang rapat Sekjen DPR, Kamis (24/04).

Dalam pertemuan tersebut, Anggota DPRD menyampaikan aspirasi terkait besarnya biaya pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol. Anggota DPRD itu mengeluhkan kenapa biaya yang besar ini mengambil dana dari APBD.

“Padahal APBD mereka hanya Rp 3,7 triliun. Sementara pembebasan tanah



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti menerima Anggota DPRD Sumbar.

memakan anggaran hingga Rp 800 miliar. Itu kan tidak mungkin. Hanya untuk ini saja, bisa didemo masyarakatnya,” jelas Win, panggilan akrab Winantuningtyastiti.

Salah satu Anggota DPRD menyampaikan, APBD Sumbar belum mampu untuk membebaskan biaya pembebasan lahan, padahal untuk saat ini membutuhkan pembangunan jalan tol.

“Mereka meminta disampaikan usulan kepada Anggota DPR RI khususnya Komisi V, agar pembangunan infrastruktur di Sumbar terutama di wilayah Selatan maupun Utara seimbang. Selama ini, pembangunan infrastruktur cenderung lebih berat di wilayah Utara,” jelas Win.

Oleh karena itu, Win memberikan saran, agar DPRD Sumbar dapat menyampaikan aspirasi secara tertulis kepada Pimpinan DPR dan Komisi V. Sehingga, pengajuan pembangunan jalan tol yang sudah diajukan dari tiga tahun lalu ini bisa segera terlaksana.

“Saya semangat untuk usulan tersebut kepada Anggota Dewan dan Pimpinan DPR. Supaya menjaga akuntabilitasnya, agar disampaikan secara tertulis dengan data-data, dan harus sinkron, tidak hanya usulan DPRD, namun juga didukung oleh Pemda. Mudah-mudahan bisa terlaksana, paling tidak untuk tahun depan,” harap Win. (sf) foto: naefurodji/parle/hr.

## Ketua DPR Harapkan Segera Bekerjasama Dengan Parlemen Thailand



Ketua DPR RI Marzuki Alie.

Pembentukan Gugus Tugas Nasional Anti Korupsi GOPAC (Global Organization Parliamentarians Against Corruption) Thailand mengalami penundaan sehubungan dengan

dibubarkannya Parlemen Thailand. Perdana Menteri Yingluck Sinawathra membubarkan Parlemen dan meminta dilakukan pemilihan umum lebih awal sebagai upaya menyelesaikan krisis politik yang terjadi.

Seperti diberitakan oleh euronews.com, setelah pemilu terakhir yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2014 dibatalkan oleh Mahkamah Agung Thailand, Komisi Pemilihan Umum Thailand dan para politisi belum menemukan kata sepakat terkait tanggal dilaksanakannya pemilu berikutnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Presiden SEAPAC (Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption) yang juga Ketua DPR-RI, Marzuki Alie menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi yang terjadi di Thailand. Namun demikian, melihat dinamika yang terjadi, Marzuki berharap bahwa krisis politik di Thailand dapat segera menemukan titik terang dan Thailand dapat membentuk parlemen yang baru. Kedepannya, Ketua DPR juga mengharapkan dapat bekerjasama dengan anggota parlemen Thailand yang nanti terpilih dalam upaya bersama melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di kawasan dalam kerangka SEAPAC. (mp) foto: andry/parle/hr.

# Tim Kehumasan DPR Studi Banding ke Museum BI dan Fatahillah



Karo Humas dan Pemberitaan Setjen DPR RI Djaka Dwi Winarko didampingi Tim Kehumasan DPR di Museum BI.

Kunjungan Tim Kehumasan DPR RI ke Museum Bank Indonesia dan Museum Fatahillah, bertujuan dalam rangka mencari informasi dalam hal suatu pembandingan, karena Sekretariat DPR RI mempunyai rencana merevitalisasi Museum yang ada di DPR.

Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Setjen DPR RI Djaka Dwi Winarko menjelaskan bahwa Museum DPR merupakan bagian penting bagi DPR terutama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan generasi muda mengenai DPR. “Museum yang ada di DPR perlu ada pembenahan secara menyeluruh yang nantinya menjadi bagian paket *tour building* yang ada di DPR,” katanya, Selasa (23/4), di Museum BI, Jakarta.

Sekarang ini banyak murid-murid dari tingkat SD sampai perguruan tinggi yang datang ke DPR, nantinya diharapkan mereka selain mendapatkan sosialisasi pemahaman mengenai DPR satu paket dengan sejarah DPR yang ada di Museum DPR.

Oleh karena itu, menurut Djaka, penting dilakukan studi banding ke museum-museum ini dari sisi manajemen, pengelolaan, dan koleksi yang

akan menjadi dasar informasi awal untuk merevitalisasi Museum DPR.

“Telah disepakati antara Tim Kehumasan DPR dan pengelola museum-museum tersebut bahwa ini adalah pertemuan awal yang selanjutnya akan diadakan pertemuan kembali untuk dapat mewujudkan Museum DPR yang bisa menggambarkan peran dan fungsi DPR dari awal sebelum kemerdekaan hingga saat ini,” paparnya.

Selanjutnya, informasi dan keterangan yang dinilai berharga, Tim Kehumasan DPR berkerjasama dengan Universitas Indonesia akan memformulasi untuk dapat mewujudkan dan merealisasikan *blueprint* revitalisasi museum yang ada di DPR.

“Kita berharap akan mendapatkan dukungan dari DPR, khususnya Pimpinan DPR dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR untuk mewujudkan museum yang komprehensif sehingga dapat menjelaskan peran dan fungsi DPR dari prakemerdekaan sampai saat sekarang,” tegas Djaka.

Setelah melihat beberapa museum, Kepala Bagian Humas DPR Suratna menjelaskan bahwa dalam rangka

revitalisasi Museum DPR, maka yang harus dilakukan pertama adalah perjalanan sejarah harus digambarkan dengan jelas dalam Museum DPR.

Kedua adalah koleksi museum harus dicari dan dikumpulkan secara lengkap, karena ke depan diharapkan Museum DPR dapat menjadi pusat studi politik bagi generasi muda Indonesia. “Perlu juga simulasi bagi anak-anak dan pengunjung Museum sehingga mereka mendapatkan pendidikan politik setelah mereka datang ke museum di DPR,” katanya.

Selanjutnya, terkait interior Museum DPR, yang menurutnya perlu ditata lagi. Perlu catatan sejarah sehingga tata ruang interior dan desain sesuai dengan perjalanan sejarah yang terjadi. “Kita harapkan sebelum masuk ruang museum ada ruang yang menjelaskan isi museum secara keseluruhan,” ungkapnya.

Selain itu, menurut Suratna Bagian Humas juga akan mempersiapkan SDM dan sertifikasi bagi *guide*, sehingga SDM tersebut dapat menjelaskan perjalanan sejarah Politik DPR. (As) foto: andri/parle/hr.



Rapat Audiensi Komisi VIII DPR RI dengan KPAI terkait kasus pelecehan seksual terhadap anak TK di JIS, Jumat (25/4) Foto: Andri/Parle/HR.



Staf Pemberitaan DPR RI menghadiri Workshop “Jurnalisme dalam Membangun Kepercayaan Publik” yang diselenggarakan oleh Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP UI Depok, Kamis (24/4) Foto: Iwan Armanias, Andri/Parle/HR.



Kunjungan Tim Kehumasan DPR RI ke Museum Bank Indonesia dan Museum Fatahillah bersama CEPP FISIP UI terkait rencana revitalisasi Museum DPR, Rabu (23/4). Foto: Andri/Parle/HR.